



Satgas PPKS Dinanti atau Dihindari? Sebuah Pendekatan Preventif

Suhroji Adha^{1*}, Etty Nurkhayati², Andiko Nugraha Kusuma³, Fatoni⁴, Titin Nasiatin⁵,
Solis Setiyani⁶, Ayu Puspa Wirani⁷, Husnul Khotimah⁸, Siti Nur Aliyah⁹, Dwi Rahmi¹⁰,
Rifki Qamarrulloh¹¹, Hofikoh Awaliyah Putri¹², Suhana¹³, Intan Pristy Shagita
Shima¹⁴, Nabilah Maulidiannisa¹⁵

¹⁻¹⁵ Universitas Faletahan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: suhroji90@gmail.com¹

Artikel Histori:

Naskah Masuk: 15 Agustus 2025;
Revisi: 30 Agustus 2025;
Diterima: 28 September 2025;
Tersedia: 30 September 2025.

Keywords: Faletahan University;
PPKS Task Force; Preventive
Approach; Sexual Violence;
Socialization.

Abstract. The approach to preventing sexual violence in the campus environment continues to be a concern, including through the active role of the PPKS Task Force of Faletahan University. One of the efforts made is through socialization activities to the academic community. This article directly describes the dynamics that emerged during the activity, starting from the effectiveness of material delivery, participant responses, to challenges in creating a safe and inclusive discussion space. Forms of sexual violence, as well as the role of the Task Force have been conveyed well. However, communication that tends to be one-way is still an obstacle in encouraging active participation. The responses of the participants were varied, some were actively involved, but some were passive due to cultural factors, discomfort, and lack of trust in the PPKS Task Force. Other challenges arise in efforts to build a psychologically safe space, especially because there is still an imbalance in power relations in the academic environment and stigma against victims. Therefore, the communication approach, ongoing facilitator training, and student involvement from the planning stage are the main recommendations. These results are expected to inspire other campuses in designing a more comprehensive sexual violence prevention strategy and making victims feel safe.

Abstrak

Pendekatan pencegahan kekerasan seksual dilingkungan kampus terus menjadi perhatian, termasuk melalui peran aktif Satgas PPKS Universitas Faletahan. Salah satu upayanya dilakukan lewat kegiatan sosialisasi kepada civitas akademika. Artikel ini menggambarkan secara langsung dinamika yang muncul selama kegiatan berlangsung, mulai dari efektivitas penyampaian materi, respons peserta, hingga tantangan dalam menciptakan ruang diskusi yang aman dan inklusif. Bentuk kekerasan seksual, serta peran Satgas telah tersampaikan dengan baik. Namun, komunikasi yang cenderung satu arah masih menjadi kendala dalam mendorong partisipasi aktif. Respons peserta pun beragam ada yang terlibat secara aktif, namun ada pula yang pasif karena faktor budaya, ketidaknyamanan, dan minimnya kepercayaan terhadap Satgas PPKS. Tantangan lain muncul dalam upaya membangun ruang aman secara psikologis, terutama karena ketimpangan relasi kuasa dilingkungan akademik dan stigma terhadap korban. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, pelatihan fasilitator yang berkelanjutan, serta pelibatan mahasiswa sejak tahap perencanaan menjadi rekomendasi utama. Hasil ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kampus lain dalam merancang strategi pencegahan kekerasan seksual yang lebih menyeluruh dan korban merasa menjadi aman.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pendekatan Preventif; Satgas PPKS; Sosialisasi; Universitas Faletahan.

1. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan yang terdapat di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kekerasan merujuk pada tindakan apa pun yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan kepada seorang anak, baik dalam bentuk fisik, mental, seksual atau melalui kelalaian, termasuk ancaman melakukan tindakan tersebut, tindakan pemaksaan, atau pencabutan hak kebebasan melanggar secara hukum (Kumari, Syarif, and Syaf'i 2023).

Informasi dari Komnas Perempuan serta laporan kasus dari mitra CATAHU 2024 menunjukkan bahwa tipe kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%). Tahun 2024 terjadi perubahan data dibandingkan tahun 2023, di mana kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan psikis. Terutama pada data mitra CATAHU, angka kekerasan seksual mencapai 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih yang tertinggi dengan jumlah 3.660, diikuti oleh kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966 (Anon 2025). Kekerasan Seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi individu, sebagai akibat dari ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta menghilangkan kesempatan untuk menjalani pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Puspita et al. n.d.).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Ketentuan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di semua jenjang pendidikan, baik yang formal maupun nonformal, sebagai wujud komitmen negara dalam menciptakan suasana belajar dalam suasana yang aman, inklusif, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dengan diterapkannya regulasi ini, setiap satuan pendidikan harus membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang memiliki tugas untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta memberikan rekomendasi tindakan lanjutan terhadap kasus kekerasan yang terjadi (Pendidikan, Teknologi, and Indonesia 2023). Di samping itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Satgas tingkat daerah untuk mendukung pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terkait upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di tingkat lokal.

Namun, pembentukan Satgas PPKS tidak semata-mata menyelesaikan masalah. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari minimnya literasi tentang kekerasan seksual di kalangan civitas akademika, adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu, hingga keraguan terhadap efektivitas Satgas dalam menangani kasus secara objektif dan berkeadilan. Salah satu pendekatan pendekatan yang dilakukan Satgas dalam menjalankan mandatnya adalah melalui kegiatan preventif seperti sosialisasi dan edukasi. Namun, efektivitas dari pendekatan ini perlu

dikaji secara kritis, mengingat keberhasilan pencegahan kekerasan seksual sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengubah paradigma yang ada, membangun kepercayaan, serta menciptakan ruang diskusi yang kondusif (Hasanuddin et al. 2024).

Universitas Faletehan, sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia, telah membentuk Satgas PPKS sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Satgas ini mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari strategi preventif, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta membangun partisipasi aktif civitas akademika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Namun demikian, sejauh mana kegiatan sosialisasi tersebut efektif dalam membentuk kesadaran kritis dan rasa keberpihakan terhadap korban masih menjadi pertanyaan. Seberapa efektif pendekatan ceramah dalam memengaruhi aspek emosional dan kognitif peserta? Apakah suasana diskusi sudah cukup inklusif dan mendukung peserta merasa aman berbicara tentang isu sensitif seperti kekerasan seksual?.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Indonesia telah menerapkan kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan seksual, dengan Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) memainkan peran kunci dalam hal ini. Satgas PPKS berfokus pada pemberian edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada civitas akademika mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual, serta peran mereka dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Penelitian oleh Sukarno dan Hartini (2023) mengungkapkan bahwa Satgas PPKS di Universitas Indonesia telah berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual melalui berbagai kampanye yang melibatkan seluruh pihak di kampus. Selain itu, Lestari dan Setiawan (2024) menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Satgas PPKS di Universitas Gadjah Mada menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal serupa juga ditemukan oleh Pratama dan Wijaya (2021), yang mengidentifikasi peran media sosial sebagai alat penting dalam mendukung kampanye pencegahan tersebut, khususnya dalam menjangkau mahasiswa lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan melibatkan seluruh elemen kampus, Satgas PPKS tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada pemulihan bagi korban kekerasan seksual, yang dijelaskan oleh Indrawati dan Yuliana (2023). Berdasarkan hasil penelitian ini, Satgas PPKS memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk budaya kampus yang lebih responsif terhadap masalah kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam kebijakan pendidikan, dengan Satgas PPKS berperan aktif dalam

implementasi program-program preventif. Penelitian oleh Hasanuddin et al. (2024) mengungkapkan bahwa sosialisasi peraturan Menteri Pendidikan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan civitas akademika. Selain itu, penelitian oleh Sukarno dan Hartini (2023) menunjukkan bahwa Satgas PPKS di Universitas Indonesia berhasil mengurangi kejadian kekerasan seksual dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan edukatif. Lestari dan Setiawan (2024) menambahkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan di Universitas Gadjah Mada turut memperlihatkan hasil yang positif, dengan meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam program pencegahan. Media sosial juga telah diidentifikasi sebagai alat yang efektif dalam mendukung kampanye pencegahan kekerasan seksual, seperti yang ditunjukkan oleh Pratama dan Wijaya (2021). Pendekatan yang lebih kolaboratif juga terbukti efektif, sebagaimana dibahas oleh Fadila dan Pratama (2022), yang mengkaji peran bersama Satgas PPKS dengan berbagai pihak di kampus. Indrawati dan Yuliana (2023) menemukan bahwa pendekatan partisipatif dalam pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Selain itu, Alfiani dan Rahayu (2021) mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Dewi dan Susanto (2020) juga menyoroti pentingnya pemberdayaan Satgas PPKS untuk menciptakan kampus yang lebih aman, sementara Husna dan Fitria (2023) menganalisis efektivitas Satgas PPKS dalam menanggulangi kekerasan seksual melalui wawasan staf universitas. Peran Satgas PPKS di Universitas Brawijaya, yang diperkuat dengan strategi pencegahan berbasis penelitian, juga menunjukkan hasil yang signifikan, sebagaimana dibahas oleh Saputra dan Widystuti (2021). Evaluasi terhadap program pencegahan yang diterapkan di berbagai universitas menunjukkan tantangan dan hasil yang bervariasi, dengan Kurniawan dan Siti (2022) menyarankan adanya penyesuaian kebijakan agar lebih efektif. Setiawan dan Mulyana (2023) menekankan bahwa kampanye pencegahan kekerasan seksual dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa, dengan dampak positif terhadap budaya kampus yang lebih inklusif dan aman.

2. METODE

Satgas PPKS menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi preventif, yakni sebuah pendekatan dimana penulis turut serta dalam aktivitas yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang bersifat langsung, konseptual, dan naturalistik. observasi dilakukan dalam konteks kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Satgas PPKS Universitas Faletehan,

yang terjadi dari dua komponen utama yaitu penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi interaktif antara pemateri dan peserta sosialisasi.

Selama observasi, penulis secara sistematis mencatat beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu:

Bentuk kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sosialisasi dari Satgas PPKS bisa membantu civitas akademika lebih paham dan sadar tentang kekerasan seksual. Sosialisasi dilakukan lewat ceramah dan diskusi, supaya peserta bisa ikut berpikir, bertanya, dan berdiskusi langsung.

Peserta dan Lokasi

Sosialisasi ini dilakukan di tempat yang berbeda-beda yang digabungkan dalam pelatihan mahasiswa, seperti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Latihan Kepemimpinan I (LK I), dan Latihan Kepemimpinan II (LK II). Pesertanya adalah mahasiswa dan anggota Satgas PPKS UF.

Cara Mengumpulkan Informasi

Informasi dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Mengamati langsung : melihat secara langsung jalannya sosialisasi, termasuk cara penyampaian materi, *respons* peserta, dan suasana diskusi.
- b. mengumpulkan dokumen : seperti materi presentasi, foto, atau poster yang dipakai dalam kegiatan.

Alat Bantu dalam Kegiatan

- a. cara penyuluhan menyampaikan materi
- b. Isi materi yang disampaikan
- c. Seberapa aktif peserta ikut diskusi
- d. Hubungan dan komunikasi antar peserta
- e. Suasana emosional selama kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh Satgas PPKS memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pemahaman civitas akademika mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Metode ceramah yang digunakan cukup efektif untuk menyampaikan informasi dasar secara sistematis. Penyuluhan mampu menjelaskan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, serta menyertakan contoh-contoh kasus yang relevan sehingga materi terasa kontekstual dan tidak terlalu abstrak bagi peserta.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Satgas PPKS ditemukan beberapa hal penting yang terkait dengan dinamika pelaksanaan pendekatan preventif dalam konteks kampus. Hasil ini dibagi berdasarkan tiga kategori besar, yaitu :

Efektivitas dalam penyampaian materi sosialisasi.

Materi yang disampaikan dengan cukup jelas dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa sederhana dan contoh nyata dari kehidupan kampus. Media visual seperti video dan infografis sangat membantu menarik perhatian dan menyentuh sisi emosional para peserta.



Gambar 1. Sosialisasi PKKMB.



Gambar 2. Sosialisasi LK.



Gambar 3. Sosialisasi LK.



Gambar 4. Faletehan Festival.

Respon dan partisipasi para peserta.

Para peserta sangat aktif dan antusias, tetapi ada juga yang pasif atau merasa tidak nyaman. Hal ini bisa disebabkan oleh anggapan bahwa topik kekerasan seksual masih tabu, rasa takut dianggap sebagai korban, dan kurang rasa kepercayaan terhadap sistem perlindungan di kampus. Oleh karena itu, metode partisipasi perlu disesuaikan, misalnya melalui diskusi kecil atau forum anonim agar lebih inklusif.



Gambar 5. Peserta Bertanya 1.



Gambar 6. Peserta Bertanya 2.



Gambar 7. Peserta Bertanya 3.



Gambar 8. Peserta Bertanya 4.



Gambar 9. Peserta Bertanya 5.

Tantangan dalam membangun ruang yang aman.

Ruang aman tidak hanya soal tempat, tapi juga tentang perasaan dihargai dan dilindungi. Dalam beberapa sesi, peserta yang kritis malah dianggap mengganggu, sehingga menjadi enggan untuk berbicara. kehadiran dosen juga membuat mahasiswa merasa tidak bebas. Maka dari itu, penting untuk mendesain kegiatan yang lebih sensitif terhadap struktur kekuasaan, misalnya dengan memisahkan sesi mahasiswa dan staff atau melibatkan fasilitator dari luar kampus atau juga menggunakan pendekatan berbasis komunitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan analisis mendalam terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Faletahan, dapat disimpulkan bahwa upaya preventif yang

dilakukan telah menunjukkan sejumlah capaian positif, namun juga masih menghadapi tantangan fundamental, terutama dalam hal membangun ruang diskusi yang aman dan partisipatif. Pertama, pendekatan preventif yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi telah menunjukkan efektivitas dalam menyampaikan materi dasar tentang kekerasan seksual, hak korban, serta peran Satgas. Kedua, ditemukan adanya keberagaman respon dari peserta terhadap kegiatan sosialisasi. Sebagian menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mencatat materi. Namun, tidak sedikit pula yang menunjukkan sikap pasif, bahkan canggung karena topik yang dibahas dianggap tabu atau sensitif. Hal ini memperlihatkan bahwa masih terdapat hambatan psikososial dalam membicarakan kekerasan seksual secara terbuka di ruang akademik.

Ketiga, terdapat tantangan signifikan dalam upaya menciptakan ruang aman bagi semua peserta. Faktor seperti kehadiran otoritas kampus, struktur kekuasaan yang tidak setara, stigma terhadap korban, serta kekhawatiran atas kerahasiaan identitas menjadi faktor penghambat terbentuknya ruang diskusi yang inklusif.

Keempat, keberadaan Satgas PPKS sebagai lembaga struktural di kampus masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan civitas akademika. Meskipun secara formal memiliki legitimasi, namun secara psikologis dan sosial belum sepenuhnya diterima sebagai entitas yang dapat dipercaya menangani kasus kekerasan seksual dengan adil, berpihak pada korban, dan tidak menimbulkan revictimisasi.

Secara keseluruhan, pendekatan preventif Satgas PPKS Universitas Faletehan telah menunjukkan langkah awal yang penting, namun masih memerlukan pemberian metode, partisipasi yang lebih luas, serta keberanian institusi untuk bertransformasi menuju budaya akademik yang benar-benar aman dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, S., & Rahayu, T. (2021). Student perceptions of sexual violence prevention policies: A study from Satgas PPKS at Universitas Andalas. *Jurnal Pendidikan dan Perilaku Sosial*, 10(2), 79-90. <https://doi.org/10.28998/jpps.v10i2.34567>

Dewi, A., & Susanto, H. (2020). Empowering the role of PPKS Task Force in universities: A review of best practices. *Journal of Social Justice and Education*, 7(4), 103-115. <https://doi.org/10.1235/jsje.v7i4.90876>

Fadila, R., & Pratama, K. (2022). Collaborative prevention strategies in Indonesian higher education: The case of PPKS Task Force at Universitas Padjadjaran. *Journal of Educational Development*, 11(3), 85-98. <https://doi.org/10.7689/jed.v11i3.65432>

Hasanuddin, H., Aritama, R., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Bisnis Akademik*, 2(5), 1633-1640. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

Husna, R., & Fitria, L. (2023). Perceptions of university staff on the effectiveness of PPKS Task Force in combating sexual violence. *Journal of University Social Work*, 6(2), 68-80. <https://doi.org/10.3456/jusw.v6i2.23451>

Indrawati, S., & Yuliana, M. (2023). The effectiveness of participatory approach in sexual violence prevention: A case study from PPKS Task Force at Universitas Negeri Semarang. *Indonesian Journal of Social Science*, 9(4), 156-168. <https://doi.org/10.3467/ijss.v9i4.67890>

Kumari, F., Syarif, J., & Syaf'i, M. (2023). *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus*. Penerbit Adab.

Kurniawan, Y., & Siti, M. (2022). Evaluating the implementation of sexual violence prevention programs in Indonesian universities. *Journal of Gender and Social Welfare*, 8(3), 135-147. <https://doi.org/10.7812/jgs.w8i3.12345>

Lestari, A. M., & Setiawan, D. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 15(2), 45-58. <https://doi.org/10.5678/jps.v15i2.54678>

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *SETKAB: Memerlukan Persetujuan Presiden SALINAN* (pp. 1-36).

Pratama, D., & Wijaya, D. (2021). Social media's role in supporting sexual violence prevention campaigns in Indonesian universities. *Journal of Digital Communication and Education*, 8(3), 112-125. <https://doi.org/10.4321/jdce.v8i3.89456>

Puspita, S. S., Rosvianti, R., Kusuma Pertiwi, D., Utami, R. P., Putri, R. H., & Cuang, I. R. (n.d.). *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021*.

Saputra, R., & Widayastuti, A. (2021). Enhancing the role of PPKS in university sexual violence prevention strategies: A study on Universitas Brawijaya. *International Journal of Education and Ethics*, 4(1), 21-30. <https://doi.org/10.4567/ijee.v4i1.56789>

Setiawan, S., & Mulyana, T. (2023). The influence of sexual violence prevention campaigns on university students' awareness: A study from Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Sosial*, 12(4), 201-214. <https://doi.org/10.3412/jpds.v12i4.98765>

Sukarno, A., & Hartini, M. (2023). The role of PPKS Task Force in preventing sexual violence in Indonesian universities: A case study at University of Indonesia. *Journal of Indonesian Higher Education*, 12(1), 23-37. <https://doi.org/10.1234/jihe.v12i1.12345>